

**PARTAI POLITIK & POLITIK HIJAU:
Studi tentang Kepedulian Parpol terhadap Politik yang Prolingkungan
di Kota Semarang**

Supratiwi

Abstract

The purpose of the research is to seek political parties awareness on green politics in Semarang City. It is conducted towards the big five political parties according to 2009 election: Partai Demokrat (Democrat Party), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/PDI-P (Indonesian Struggle Democratic Party), Partai Amanat Nasional/PAN (National Mandate Party), Partai Keadilan Sejahtera/PKS (Justice and Prosperity Party), and Partai Golongan Karya (Functional Group Party) as they have power to make decision in Semarang City legislature including environmental policy. Using descriptive qualitative method, the research was conducted by interviewing the legislators, observation, and also documents analysis. The result is clear that political parties do not have awareness on green politics as well as environmental issues. It is reflected on the lack of environmental awareness within their vision, mission, platform, and programs. Ironically, during the previous legislature, political parties had many things to do to solve environmental problems, such as flood. They initiated many policies to build pond, increasing city's environmental budget, and also enacting law of landscape. However, for the recent legislature it has not been planned yet.

Keyword: awareness, political parties, green politics

A. PENDAHULUAN

Krisis lingkungan tengah terjadi, degradasi lingkungan tengah dirasakan semakin memburuk dalam dekade terakhir. Pemanasan global, kepunahan jenis spesies, kekeringan yang panjang, kelangkaan air bersih, pencemaran lingkungan dan polusi udara serta ancaman senjata biologis, merupakan beberapa deret permasalahan lingkungan yang bisa menghancurkan peradaban umat manusia. Kerusakan tersebut bukan hanya besar dan super mahal tapi juga berlangsung secara terus menerus.

Oliver Tickell telah mengingatkan sebelumnya bahwa manusia telah memakai 30% lebih banyak dari apa yang bumi sediakan tiap tahun (www.kabarindonesia.com). Jumlah penduduk bumi tumbuh pesat sementara kemampuan menemukan teknologi lebih lambat dari kerusakan yang sedang terjadi. Kebutuhan manusia bertambah dan semuanya mereka temukan di alam sehingga muncullah kemudian perambahan hutan secara liar yang diikuti secara bersamaan dengan penurunan kualitas tanah, pencemaran air, penurunan jumlah ikan di laut dan spesies lainnya. Menurut WWF 2005, keanekaragaman hayati juga menurun sepertiganya sejak tahun 1970.

Di Indonesia misalnya, persoalan lingkungan hidup sudah sangat akut. Lihat saja terumbu karang yang dalam kondisi baik hanya 6%, hutan yang rusak mencapai 2 juta hektar/tahun, erosi dan longsor terjadi dimana-mana. Hasil studi IPB memprediksi bahwa tahun 2010 sebanyak 55 DAS dan Sub DAS mengalami deforestasi lebih besar dari 20%. Tahun 2015 menjadi 120 DAS, tahun 2020 menjadi 123 dan pada tahun 2025 menjadi 126 DAS yang mengalami deforestasi lebih dari 29% areal DAS. Pencemaran udara dan air seolah tak terhindarkan. Bayangkan saja 73% sumur di Jawa tercemar amoniak. Kita baru sadar atas sejumlah krisis lingkungan ketika isu perubahan iklim global menguat (Gatra, Juli 2008).

Namun demikian yang mesti dipahami adalah bahwa persoalan tersebut bukanlah merupakan proses yang netral-teknis semata, tetapi lebih merupakan proses politik dari aktor-aktor yang terkait dengan kepentingan sumberdaya alam. Jadi, perubahan lingkungan merupakan bentuk *politicised environment*, menurut

Bryant (2000) kerusakan lingkungan dapat dilihat dari sumber politik (*political resources*), kondisi (konflik aktor), serta dampaknya terhadap ketimpangan sosial ekonomi.

Sumber politik masa lalu berupa kebijakan yang sangat sentralistik, antroposentrik dan teknokratik, yang tercermin dari mekanisme perijinan pemanfaatan sumberdaya. Semua harus dari pusat yang memonopoli pengetahuan dan kebenaran, sehingga hal-hal yang berbau lokal dan tradisional diabaikan. Akibatnya masyarakat menjadi tamu di rumahnya sendiri dengan tuan rumah baru yang berasal dari pemilik modal Jakarta.

Di sinilah otonomi daerah yang mengamanatkan sebuah proses desentralisasi sebenarnya bisa menjadi jalan keluar. Persoalannya adalah ternyata otonomi daerah tidak seindah yang dibayangkan. Sebagai gambaran, hasil studi kantor Menko Perekonomian pada tahun 2006 dan 2007 menunjukkan bahwa dari 119 Perda yang terkait dengan SDA, sebanyak 60% berisi ijin eksploitasi SDA, 30% berisi tindakan kolaboratif pengelolaan dan pemanfaatan SDA, dan hanya 10% yang berisi hak akses dan kontrol masyarakat atas SDA. Kondisi ini tidak lain dipicu oleh nafsu pemda untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah masih berpikir sempit dan jangka pendek, dan yang terjadi hanyalah desentralisasi dan bukan devolusi (Gatra, Juli 2008).

Tentu persoalan makin akut ketika mekanisme Pilkada diberlakukan. Hal ini karena ongkos politik akan semakin mahal dan lalu eksploitasi SDA secara berlebihan menjadi opsi yang menggiurkan. Dalam hal ini tentu tidak saja politisi daerah yang berperan tetapi juga politisi nasional. Illegal logging yang terjadi dapat dilihat dari perspektif ini. Begitu pula kasus-kasus pertambangan bermasalah.

Realitas yang demikian seharusnya menyadarkan partai-partai politik (parpol) untuk menyuarakan pentingnya kesadaran akan politik lingkungan. Partai politik sangat berperan untuk melihat arah keberpihakan pembangunan terhadap lingkungan hidup. Dengan demikian partai politik dapat membuka ruang politik bagi suara-suara marjinal dan demikian pula dengan degradasi lingkungan yang selama ini menjadi gejala represi struktural dan cenderung terdiam.

Karena itu kehadiran partai hijau di Indonesia sangat perlu karena sebagai negara dengan sumber daya alam yang besar, Indonesia harus memiliki pondasi politik lingkungan yang kuat. Sejauh ini dampak politik lingkungan yang lemah terlihat dari *output* kebijakan investasi. Pemerintah terlalu longgar memberi kesempatan kaum kapitalis masuk dan mengeksploitasi alam Indonesia tanpa kendali. Akibatnya kerusakan lingkungan terjadi di mana-mana yang tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu sudah saatnya, *green politics* dan *green party* yang pro lingkungan hidup dan keseimbangan alam hadir dan berbuat nyata di tengah sistem perpolitikan Indonesia, karena beragam kerusakan lingkungan dan bencana di Indonesia, yang di antaranya melahirkan kemiskinan dan jatuhnya banyak korban, membutuhkan kekuatan *green politics* untuk menyelesaikannya.

Sampai Pemilu 2009 baru tercatat satu partai yang mendeklarasikan dirinya sebagai partai hijau, yaitu PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). Di luar itu sangat sedikit parpol peserta Pemilu 2009 dan caleg-calegnya yang mengangkat isu lingkungan dalam kampanyenya; kebanyakan mereka lebih memilih mengusung isu pendidikan dan kesehatan gratis, demokratisasi, korupsi, dan sebagainya (www.tribun-timur.com).

Penelitian ini dilakukan terhadap lima parpol yang menempati posisi teratas dalam perolehan suara dalam Pemilu 2009 di Kota Semarang, yaitu Partai Demokrat, PDI-Perjuangan, PKS, PAN, dan Golkar . Penelitian ini memiliki peran yang strategis untuk mengetahui kepedulian parpol atas lingkungan hidup melalui platform dan program kerja serta pandangan mereka karena selama 5 (lima) tahun ke depan merekalah yang akan banyak mewarnai dan menentukan kebijakan di Kota Semarang; khususnya di lembaga legislatif.

A.1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif; yang berupaya mengungkapkan fenomena sosial politik dengan jelas dan cermat. Hal ini dikarenakan penelitian ini berupaya untuk memberikan gambaran mengenai urgensi dan peranan parpol dalam mewujudkan politik hijau (*green politics*) khususnya di kota Semarang.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Semarang; khususnya terhadap lima parpol peraih suara terbanyak pada Pemilu 2009, yaitu Partai Demokrat, PDI-P, PKS, PAN , dan Golkar . Alasan dipilihnya lima partai adalah sebagai peraih suara terbanyak maka asumsinya akan sangat berperan dalam mewarnai kebijakan; baik di legislatif maupun eksekutif untuk periode 2009-2014.

Sumber data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan kajian dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap pengurus parpol & anggota legislatif, serta beberapa anggota parpol.

A.2. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai politik kurang memiliki kepedulian karena masih sedikitnya parpol yang memasukan isu lingkungan ke dalam visi, misi, platform maupun program kerjanya. Namun melalui wakilnya di legislatif, pada masa bakti 2004-2009 parpol sudah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi masalah rob dan banjir di kota Semarang. Sedangkan untuk masa kerja 2009-2014 parpol rata-rata belum mempersiapkan program secara spesifik.

B. PEMBAHASAN

Persoalan lingkungan tidak terlepas dari persoalan politik karena menyangkut pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Karena itu sangat penting diketahui sikap parpol maupun anggota legislatif tentang isu lingkungan; karena 'nasib' lingkungan, khususnya masalah rob dan banjir di kota Semarang ditentukan oleh mereka.

Pada penelitian ini digunakan tiga parameter, yaitu:

- 1) Kepedulian partai politik di Kota Semarang tentang politik hijau/*green politics*.
- 2) Respon atas masalah lingkungan hidup di Kota Semarang, khususnya berkaitan dengan rob dan banjir.
- 3) Rencana tindakan untuk menyelesaikan masalah lingkungan hidup di Kota Semarang.

B.1. Kepedulian Partai Politik di Kota Semarang Tentang Politik Hijau/*Green Politics*.

Dari hasil telaah dokumen serta wawancara dengan para informan, ternyata

visi yang dimiliki oleh masing-masing partai politik tidak atau kurang mencerminkan kepedulian secara spesifik terhadap lingkungan. Visi yang dimiliki lebih bersifat umum dan global dalam arti menyangkut kebijakan partai secara nasional, misalnya berusaha mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, mencapai kemakmuran, pencerahan kehidupan berbangsa atau mewujudkan Indonesia baru dengan berbagai atribut pelengkapannya. Kata-kata yang disusun lebih mencerminkan sikap normatif ketimbang praktis sehingga sangat sulit diukur variabel atau indikator pencapaiannya.

Hanya pada visi partai Golkar dicantumkan lingkungan sebagai salah satu aspek yang ingin diwujudkan dalam perjuangannya. Sementara itu dari sisi misi, hanya PAN yang mencantumkannya; yang mengatakan akan memperjuangkan dilindunginya kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Partai ini berkeyakinan bahwa lingkungan hidup adalah pinjaman dari generasi mendatang yang mesti dilindungi dari keserakahan manusia.

Pada platform atau landasan pijak partai politik nampak adanya kepedulian terhadap lingkungan secara spesifik. Secara khusus hal ini terlihat dari platform Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mana Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup menjadi bagian dalam pembangunan. PKS menganggap bahwa pembangunan lingkungan hidup haruslah terintegrasi dengan pembangunan sektor lain sehingga tercapai keseimbangan. Kasus-kasus bencana lingkungan seperti banjir dan kesulitan air sebenarnya merupakan dampak dari keserakahan manusia yang selalu ingin mengeksploitasi alam tanpa pernah memikirkan keseimbangan dalam pemanfaatan sumber-sumber daya alam. Oleh karena itu PKS menganggap perlu dan penting untuk memperhatikan dan mengelola lingkungan sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan keseimbangan antara politik dan lingkungan.

Hal-hal yang menjadi perhatian dalam platform PKS mengenai pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup adalah :

1. Pemanfaatan sumber daya alam harus ditujukan untuk kepentingan umum.
2. Hak publik atas tanah, air dan udara harus dipenuhi oleh pemerintah secara adil dan bertanggung jawab.
3. Koordinasi antarkomponen, kesadaran masyarakat dan penegakan hukum atas segenap pelanggaran lingkungan adalah kata kunci dalam pembangunan lingkungan hidup.
4. Penyediaan air bersih, pemeliharaan hutan dan daerah resapan air, menjaga kebersihan pantai dan sungai serta pengelolaan limbah secara integratif.

Partai yang lain nampaknya belum memiliki platform yang jelas mengenai lingkungan hidup. Kebanyakan dari platform yang ada sebatas merupakan pernyataan moral semata yang bersifat ideologis, seperti landasan pokok kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sifat keterbukaan, nondiskriminatif, majemuk, religius, kesetaraan, pemberantasan korupsi serta wawasan kebangsaan dan keindonesiaan.

Berbicara tentang program kerja, sebagian besar informan dapat menceritakan program kerja yang telah lalu atau telah dilaksanakan. Secara jelas masing-masing informan menceritakan program kerja serta aktifitasnya yang berkaitan dengan lingkungan, sebagaimana yang dikatakan Rudi Nurrahmat (Ketua DPC Partai Demokrat), yang mengatakan bahwa program kerja yang berkaitan dengan lingkungan antara lain adalah penanaman pohon, mengadakan perlombaan taman

terbaik, juga memasukan isu lingkungan dalam kampanye, terutama masalah rob dan banjir.

Partai-partai lain pun juga mempunyai program lingkungan yang tidak jauh berbeda dengan itu; seperti bersih lingkungan, pembuatan lubang biopori, pengiriman aktifis partai sebagai delegasi lingkungan hidup ke luar negeri, kampanye lingkungan dengan media stiker, pemberian bantuan tempat dan gerobag sampah serta tanggulisasi.

Program-program tersebut dilaksanakan biasanya bertepatan dengan acara hari ulang tahun partai, pada saat kampanye atau pada saat-saat penting untuk mendapatkan simpati publik, misalnya menjelang pemilihan kepala daerah langsung. Instruksi pelaksanaan program ini lebih banyak berasal dari level atas (DPP, DPD dan DPC) sementara level paling bawah (DPRa) hanya sebagai teknis pelaksana saja. Inisiatif yang muncul dari kader atau DPRa hanya sebatas bersih lingkungan dan penghijauan saja.

Sehubungan dengan program kerja yang terkait dengan lingkungan, semua parpol memilikinya walaupun banyak yang hanya bersifat simbolik atau seremonial seperti program penanaman pohon, pembuatan taman, dan sebagainya. Belum banyak dipikirkan bagaimana keberlanjutan dan kesinambungan dari program tersebut.

Secara umum, berkaitan dengan kepedulian partai politik di Kota Semarang tentang politik hijau yang tercermin dari visi, misi, platform dan program kerjanya dapat dinyatakan bahwa kepeduliannya sudah ada tapi porsinya masih sangat sedikit dibandingkan perhatiannya terhadap bidang-bidang lain, seperti ekonomi, pendidikan, lapangan kerja, dan lain-lain.

Hanya Golkar yang mencantumkan isu lingkungan dalam visinya. Demikian juga pada misi, hanya satu partai yang mencantumkan, yaitu PAN. Sementara PKS sebagai satu-satunya partai yang memiliki platform tentang pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup; namun demikian kurang dapat menunjukkan secara detail bagaimana implementasi dari platform tersebut di dalam program kerjanya.

Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa kepedulian partai politik di Kota Semarang terhadap masalah-masalah lingkungan hidup *masih kurang*, yang tercermin dari dalam visi, misi, platform dan program kerja partai.

B.2. Respon Atas Masalah Lingkungan Hidup di Kota Semarang, Khususnya Berkaitan Dengan Rob dan Banjir.

Seluruh informan menyatakan bahwa rob dan banjir merupakan masalah lingkungan di Kota Semarang dan telah berlangsung cukup lama tanpa ada desain penyelesaian masalah yang jelas. Memang banyak masalah-masalah lingkungan hidup yang disampaikan seperti kebersihan, saluran yang macet, sampah yang masih berserakan atau kurang profesional pengelolaannya, pohon yang semakin berkurang dan berdampak pada suhu yang semakin panas, namun rob dan banjir menjadi *trade mark* bagi Kota Semarang dan tidak pernah jelas ujung pangkal penanganannya.

Informan yang duduk di lembaga legislatif (8 orang) mengakui telah melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi masalah rob dan banjir di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh seorang anggota legislatif dari Golkar bahwa Dewan sudah menganggarkan dana 20 milyar melalui Panitia Anggaran DPRD untuk mengatasi rob dan banjir. Dalam praktiknya anggaran untuk pembersihan saluran, drainase, pembuatan kolam retensi dan penanaman bakau tidak dapat terserap bahkan hangus/harus dikembalikan kepada kas negara karena

eksekutif (dalam hal ini walikota dan sekda) kurang memiliki itikad baik untuk memanfaatkan anggaran yang tersedia dengan efektif. Dalam hal ini, anggota partai politik yang duduk di kursi legislatif hanya memiliki kewenangan pembuatan kebijakan (peraturan daerah/Perda) dan penganggarannya, sedangkan untuk implementasi/pelaksanaan menjadi kewenangan pihak eksekutif (walikota, sekda dan SKPD).

Lebih lanjut anggota dewan mengatakan bahwa mereka cukup memiliki komitmen untuk menyelesaikan dan mengalokasikan anggaran penanggulangan rob dan banjir, hanya saja mereka juga membutuhkan sinergi dari eksekutif yang “memegang” anggaran dan melaksanakan kebijakan di lapangan. Tanpa adanya itikad baik dan pelaksanaan secara sungguh-sungguh dari pihak eksekutif

Selain upaya-upaya di level dewan, terdapat pula upaya-upaya yang dilakukan secara personal maupun organisasi (partai dan fraksi), seperti:

1. Menjadi mediator dan fasilitator masyarakat dengan SKPD terkait, misalnya Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Hal ini berkaitan dengan hal-hal teknis yang perlu diketahui masyarakat mengenai teknis penanggulangan masalah rob dan banjir.
2. Mengupayakan mekanisme tandingan dalam penyusunan RAPBD. Selama ini RAPBD hanya disusun oleh eksekutif saja dan legislatif terkesan hanya tinggal menyetujuinya. Oleh karena itu ada inisiatif untuk membuat RAPBD tandingan agar biaya yang muncul telah melalui pembahasan yang komprehensif karena rencana berasal dari kedua belah pihak. Sayangnya inisiatif ini tidak pernah dapat diimplementasikan karena selalu saja sudah ada draft RAPBD dari pihak eksekutif.
3. Berkaitan dengan kebijakan, telah lama dijalankan upaya berupa dukungan anggaran atas kebijakan, evaluasi dan kritik kebijakan sebagai upaya untuk menjaga, mengontrol dan memacu kinerja pemerintah. Sejauh ini upaya ini belum berhasil secara nyata dan memuaskan.

Sementara itu anggota partai politik yang tidak duduk di lembaga legislatif memberikan respon yang tidak berbeda. Mereka menilai bahwa pemerintah Kota Semarang tidak pernah tegas dan sungguh-sungguh dalam mengimplementasikan kebijakannya. Hasilnya adalah sikap apatis serta rendahnya kesadaran warga untuk berpartisipasi dalam kebijakan. Bahkan jika tidak ada momentum khusus, seperti hari ulang tahun Kota Semarang atau HUT Kemerdekaan RI, masyarakat tidak tergerak untuk memperhatikan, merapikan dan mengatur lingkungannya.

Dalam hal respon atas masalah lingkungan di Kota Semarang khususnya berkaitan dengan rob dan banjir, informan yang duduk di lembaga legislatif telah melakukan berbagai upaya yang cukup banyak namun belum sepenuhnya mendapatkan dukungan dari eksekutif. Padahal pelaksanaan sebuah kebijakan sangat tergantung pada eksekutif. Nampaknya Pemkot Kota Semarang kurang bersungguh-sungguh melaksanakan kebijakan dalam rangka menangani rob dan banjir.

B.3. Rencana Tindakan Untuk Menyelesaikan Masalah Lingkungan Hidup di Kota Semarang.

Secara terbuka diakui oleh informan (terutama yang duduk di legislatif periode 2009-2014), bahwa mereka belum memiliki dokumen rencana tindakan (program

kerja) guna menyelesaikan masalah lingkungan di Kota Semarang, khususnya berkaitan dengan rob dan banjir.

Namun secara pribadi mereka mengaku siap mengawal agenda lingkungan, sebagaimana yang dikatakan pengurus dari PKS bahwa mereka siap mengawal isu-isu lingkungan sebagai agenda yang sangat penting sehingga permasalahan lingkungan bisa diatasi; terutama terkait dengan rob dan banjir.

Adapun usulan-usulan tersebut untuk mengatasi masalah lingkungan tsb diantaranya adalah:

1. Penanaman pohon bakau di sepanjang pantai.
2. Kerja bakti dan kebersihan lingkungan.
3. Meminta pemerintah Kota Semarang untuk bertindak tegas menegakkan PERDA lingkungan hidup dan meninjau ulang reklamasi pantai.
4. Menyusun peta masalah serta strategi penyelesaian secara komprehensif sehingga dapat dilakukan kolaborasi dan koalisi guna optimalisasi anggaran untuk menyelesaikan masalah rob dan banjir.
5. Memperketat strategi pengawasan kebijakan lingkungan (prosedur pembukaan lahan, Rencana Tata Ruang Tata Wilayah, pengurangan polusi melalui BRT, penataan lingkungan dan drainase dan pengkajian reklamasi) serta berpikir nonkonvensional dalam menangani masalah lingkungan.

Sayangnya hal tersebut masih berupa ide-ide dan belum tertuang kepada dokumen kebijakan partai, fraksi maupun rencana kerja dewan untuk jangka waktu lima tahun ke depan.

Dalam masalah lingkungan, baik partai, fraksi maupun dewan nampaknya belum memiliki formulasi kebijakan secara internal bagaimana menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Semarang terbukti dari tidak adanya dokumen resmi yang menyatakan dan menjelaskan hal tersebut. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa baik partai, fraksi maupun dewan belum memiliki rencana tindakan atas masalah lingkungan yang ada di Kota Semarang khususnya berkaitan dengan penanganan masalah rob dan banjir untuk jangka waktu lima tahun mendatang (2009-2010).

C. PENUTUP

C.1. Simpulan

Dari temuan hasil penelitian, baik dari pengkajian dokumen maupun wawancara dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Masalah rob dan banjir adalah masalah lingkungan yang cukup besar di Kota Semarang yang selalu menemui jalan buntu dalam upaya penyelesaiannya. Pada satu sisi pihak legislatif dan eksekutif tidak pernah menemukan formula sinergi sehingga kebijakan tidak pernah diimplementasikan dengan baik dan benar, sementara pada sisi yang lain masyarakat menjadi apatis dan tidak memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam penanganan masalah rob dan banjir.
2. Partai politik kurang memiliki kepedulian jika melihat kepada visi, misi, platform dan program kerja, mengingat masalah lingkungan tidak pernah dicantumkan secara detail, terlebih masalah rob dan banjir di Kota Semarang. Dokumen visi, misi dan platform lebih banyak bersifat normatif, ideologis dan sangat umum. Kepedulian sudah ada tapi porsinya masih sangat sedikit dibandingkan perhatiannya terhadap bidang-bidang lain, seperti ekonomi, pendidikan, lapangan kerja, dan

lain-lain. Hanya Golkar yang mencantumkan isu lingkungan dalam visinya. Demikian juga pada misi, hanya satu partai yang mencantumkan, yaitu PAN. Sementara PKS sebagai satu-satunya partai yang memiliki platform tentang pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup; namun demikian kurang dapat menunjukkan secara detail bagaimana implementasi dari platform tersebut di dalam program kerjanya.

3. Sudah ada tindakan dan upaya sebagai respon atas masalah lingkungan di Kota Semarang khususnya berkaitan dengan masalah rob dan banjir. Salah satu yang dilakukan parpol melalui wakilnya di DPRD Kota Semarang pada masa bakti 2004-2009 adalah dengan menyetujui anggaran sebesar 20 milyar untuk mengatasi masalah rob dan banjir. Namun sayangnya upaya yang dilakukan oleh legislatif tidak memperoleh sinergi yang positif dari pihak eksekutif.
4. Partai politik khususnya melalui perwakilannya di Dewan (Fraksi) belum memiliki rencana tindakan atas masalah lingkungan yang ada di Kota Semarang khususnya berkaitan dengan penanganan masalah rob dan banjir untuk masa bakti waktu lima tahun mendatang (2009-2014).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partai politik di Kota Semarang kurang memiliki kepedulian terhadap masalah lingkungan di Kota Semarang khususnya berkaitan dengan masalah rob dan banjir. Kepedulian yang ada sifatnya masih bersifat parsial dan insidental, belum terwadahi secara organisasi dan komprehensif dalam dokumen resmi partai dan juga belum menjadi program yang utama dan berkesinambungan..

C.2. Saran

Dari berbagai fakta dan data yang diperoleh, penyusun memformulasikan saran-saran sebagai berikut :

1. Administrasi partai dan fraksi agar ditata lebih baik sehingga dokumen formal seperti visi, misi, platform dan program kerja dapat dibaca dan dikaji oleh siapapun khususnya pengurus dan konstituen.
2. Partai politik perlu mewadahi aspirasi yang berkembang dan memformulasikannya ke dalam program kerja. Bilamana perlu partai politik dapat menyusun visi, misi, platform dan program kerja yang lebih membumi atau sesuai dengan karakter wilayah Kota Semarang.
3. Perlu adanya terobosan-terobosan dan itikad baik untuk menjembatani kemandegan komunikasi dan kolaborasi kebijakan antara legislatif dan eksekutif, baik untuk urusan APBD maupun masalah-masalah sosial yang lain. Jika semua pihak melestarikan cara-cara yang selama ini dilakukan maka sinergi kedua lembaga dan keberhasilan akan jauh dari kenyataan sehingga yang rugi juga masyarakat Kota Semarang.
4. Partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan untuk mengontrol, mengevaluasi dan memberikan masukan baik kepada lembaga legislatif maupun eksekutif, jika tidak kedua lembaga tersebut akan menggunakan “cek kosong” yang diberikan oleh para konstituen pada saat pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah. Di era demokrasi yang sekarang ini, masyarakat bukan lagi obyek melainkan subyek kebijakan.

DAFTAR RUJUKAN

Amal, Ichlasul, *Teori-Teori Mutakhir Parpol*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989
Budiharjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1997
Haryanto, *Parpol: Suatu Tinjauan Umum*, Yogyakarta: Liberty, 1994
Haryanto, *Sistem Politik: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1982
Hidayat, Herman, *Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008
Kartodihardjo, Hariadi, *Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia*, Jakarta: Equinox Publishing Indonesia, 2006
Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda, 2000
Susilo, Dwi Rachmad K, *Sosiologi Lingkungan*, Jakarta : Rajawali Pers, 2008
Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, PT Grasindo, Jakarta, 1999
Surachmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1992

Sumber lain:

Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia Vol.1/No 1, April 2007
Gatra, Juli 2008

www.kabarindonesia.com

www.waspada.co.id

www.tribun-timur.com

www.beritabumi.or.id.

<http://www.waspada.co.id>

www.greenparty.ca

www.pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi